

## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020

19

Burhanudin Mukhamad Faturahman dan Mandala Harefa

### Abstrak

*Pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal I/2020 yang hanya mencapai 2,97%. Indikator secara year-on-year (yoy) sebesar -2,41% dibanding kuartal IV/2019. Sementara proyeksi pertumbuhan PDB 2020 bergerak 2,3% pada Skenario Berat dan -0,4% pada Skenario Sangat Berat. Adapun tujuan penulisan yaitu mengetahui upaya pemerintah dalam mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah memberikan insentif fiskal Jilid I dan II dengan total Rp33,2 triliun. Upaya lain adalah protokol manajemen krisis ekonomi secara komprehensif, seperti akses permodalan pada industri strategis yang terdampak, kebijakan insentif dan stimulus pada sektor kesehatan, social safety net, efisiensi belanja APBN, realokasi anggaran APBN maupun APBD untuk mendukung program kontingensi penanganan Covid-19, stimulus pada sektor riil dan, meningkatkan belanja sosial bagi masyarakat miskin. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menstimuli konsumsi dan kebijakan investasi jangka panjang serta mempercepat pemulihan pandemi Covid-19 serta memperbaiki sistem kesehatan.*

### Pendahuluan

Implikasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak Maret 2020 telah memberikan sentimen negatif bagi perekonomian nasional. Pemerintah harusnya sejak awal mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Perekonomian Indonesia dikhawatirkan akan jauh lebih buruk dibanding krisis lain sebelumnya. Data historis menunjukkan, kawasan Asia masih bisa tumbuh dengan laju rata-rata

tahunan 4,7% ketika krisis keuangan global pada tahun 2008/2009, dan 1,3% selama krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Kondisi pandemi Covid-19 mendesak pemerintah untuk secara cepat mengatur strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negeri.

Pada kuartal I/2020, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84%, atau melambat dibandingkan dengan kuartal I/2019 sebesar 5,02%. Investasi juga lesu, lantaran melambat dari 5,03% pada kuartal I/2019 menjadi 1,7% pada kuartal



I/2020. Komponen lainnya, yakni konsumsi pemerintah pun tak bisa diharapkan banyak dengan perlambatan dari 5,22% menjadi 3,74% pada periode yang sama (finance.detik.com, 10 Mei 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi perlambatan ekonomi Indonesia kuartal/2020 menjadi yang terendah sejak kuartal IV/2001. Padahal, sebelumnya, pemerintah memproyeksikan laju ekonomi pada kuartal I/2020 bisa mencapai 4,7% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini tidak terlepas dari dampak negatif pandemik yang membuat konsumsi rumah tangga turun (bps.go.id, 5 Mei 2020). Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini mengkaji upaya pemerintah dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

### Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2020

Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% pada kuartal I/2020 tergolong baik. Argumentasinya, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif di tengah pandemi. Pada periode yang sama, sejumlah negara dan kawasan memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif secara *year-on-year* antara lain China -6,8%, Singapura -2,2%, Uni Eropa -2,7%, dan Hong Kong -8,9%. Seperti yang diprediksi dan skenario, memang pertumbuhan ekonomi turun akibat Covid-19 itu dari sisi permintaan atau konsumsi yang cenderung turun periode Februari-April 2020 (koransolo.co, 8 Mei 2020).

Pada kuartal kedua 2020, di tengah penerapan PSBB (Pembatasan

Sosial Berskala Besar), pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan akan sesuai dengan proyeksi pemerintah sebesar 2,3%. Namun, jika daya beli tidak membaik, proyeksi tersebut rawan. Terlebih, kontraksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berlanjut di kuartal II/2020. Pemerintah harus mewaspadai penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 hingga kuartal IV/2020, menyusul rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020. Diprediksi pada kuartal II/2020 bahkan kuartal III/2020 bisa lebih buruk dari capaian sekarang sehingga pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk. (money.kompas.com, 10 Mei 2020).

Perekonomian Indonesia tumbuh 4,97% (YoY) pada triwulan IV/2019 lalu. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2018 sebesar 5,02% (YoY). Menurut Bappenas (2020) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam APBN tahun Anggaran 2020 seiring dengan besarnya *downside risk* yang dihadapi.

Dalam skenario ekonomi makro, perlambatan tercermin pada proyeksi pertumbuhan PDB 2020 yang bergerak pada 2,3% pada Skenario Berat dan -0,4% pada skenario Sangat Berat. Perekonomian nasional akan kehilangan lebih dari separuh kapasitas normalnya, bahkan diperkirakan akan kehilangan keseluruhan kapasitasnya. Demikian juga pada pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS yang cepat dan drastis (lihat tabel 1).

Tabel 1.Skenario Outlook Indikator Utama Ekonomi Makro Tahun 2020

Indikator	APBN Tahun 2020	Skenario	
		Berat	Sangat Berat
Pertumbuhan PDB (% , yoy)	5,3	2,3	-0,4
Harga ICP (USD/barel)	63	38	31
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.400	17.500	20.000
Inflasi (%)	3,1	3,9	5

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Untuk skenario berat, ekonomi diprediksi masih bisa tumbuh positif 2,3%. Jumlah orang miskin akan bertambah 1,16 juta orang dengan jumlah pengangguran bertambah 2,92 juta orang dari 6,88 juta orang per Februari 2020. Pada skenario sangat berat, ekonomi diprediksi tumbuh negatif 0,4%. Jumlah orang miskin akan bertambah 3,78 juta orang, Kemudian jumlah pengangguran juga akan bertambah 5,23 juta orang, dari 6,88 juta orang per Februari 2020 (cnbcindonesia.com, 7 Mei 2020).

Jika perlambatan ekonomi sepanjang 2020 berlanjut atau lebih parah dibandingkan kuartal I/2020, maka diperkirakan perekonomian dalam negeri akan mengalami resesi. Pemerintah juga harus memprioritaskan keselamatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan penambahan jumlah rakyat miskin dampak peandemi Covid-19. Beberapa langkah upaya pemerintah dalam mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akan dijelaskan di bawah.

### Upaya Antisipasi Perlambatan Ekonomi

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) hingga saat ini membuat

ekonomi dunia terutama di China diprediksi turun 1% secara berturut-turut di kuartal I/2020 dan II/2020. Hal ini telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I/2020. Saat ini, pemerintah sendiri telah meluncurkan dua paket stimulus fiskal akibat penyebaran virus corona. Paket stimulus ekonomi Jilid I dirilis pada Februari 2020 dengan total insentif sebesar Rp10,3 triliun. Kemudian, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp22,9 triliun untuk paket kebijakan fiskal jilid II. Insentif yang masuk dalam paket ini antara lain adalah seperti pembebasan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga penundaan PPh Pasal 22 dan Pasal 25 (CNN Indonesia, 13 Maret 2020).

Kebijakan ekonomi lain juga diberlakukan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat epidemi virus corona dengan tambahan dana sebesar Rp405,1 triliun untuk meredam dampak ekonomi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (nasional.kontan.co.id, 6 Mei 2020).

Selain aspek fiskal, menurut Hariyadi (2020), pemerintah perlu menyiapkan langkah kontingensi untuk mengatasi potensi berkembang menjadi krisis ekonomi. *Pertama*, menyiapkan simulasi dan skenario protokol manajemen krisis secara komprehensif dengan mengupdate variabel yang sesuai perkembangan ekonomi terkini. Indonesia telah memiliki Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam sistem keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yang memuat langkah pencegahan krisis dan penanganan krisis.

*Kedua*, stimulus kebijakan fiskal dan akses permodalan pada industri strategis yang terdampak, seperti sektor industri pariwisata dan industri padat karya serta yang berpotensi kolaps akibat pandemi Covid-19. *Ketiga*, kebijakan insentif dan stimulus pada sektor kesehatan, *social safety net* (jaring pengaman sosial), dan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor rill perlu didorong agar bergairah karena menyangkut roda ekonomi rakyat sehari-hari. Langkah pemerintah dengan memberikan paket insentif Rp10 T untuk sektor tenaga kerja dan UMKM menjadi terobosan penting mengantisipasi krisis.

*Keempat*, efisiensi *government expenditure* terutama belanja rutin birokrasi. Selama ini belanja birokrasi menempati posisi tertinggi dalam postur APBN dan memiliki ruang yang memadai untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan prioritas anggaran pemerintah. *Kelima*, realokasi anggaran baik pada level APBN

maupun APBD untuk mendukung program kontingensi seperti penanganan pandemi Covid-19 dan stimulus pada sektor rill.

Keenam, meningkatkan belanja sosial dalam program-program bantuan sosial bagi masyarakat rentan terdampak dari perlambatan ekonomi. Bahwa pemerintah telah menjanjikan berbagai program sosial yang tentu dapat segera direalisasikan seperti alokasi anggaran bagi subsidi sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kebijakan ini merupakan alternatif ditengah ketidakpastian perekonomian dunia. *International Monetary Fund* (IMF) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 sebesar 3,0%, lebih rendah 0,2% dari proyeksi bulan Juli 2019. Pada tahun 2020, perekonomian global diproyeksi tumbuh lebih cepat sebesar 3,4%. Namun, negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang juga diprediksi masih akan tumbuh melambat pada tahun 2020 (CNBCIndonesia.com, 21 Januari 2020).

Selama pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat terdampak mencerminkan investasi jangka panjang. Hal ini sangatlah penting mengingat penyediaan dana penanggulangan dalam jumlah lebih besar dari dana insentif pemulihan ekonomi adalah investasi jangka panjang. Terlebih, menyelamatkan nyawa manusia juga merupakan upaya menyelamatkan sektor-sektor ekonomi.

## Penutup

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal pertama di tahun 2020 yang hanya mencapai 2,97%. Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi Indonesia,

bergerak pada skenario Berat dan skenario Sangat Berat. Perekonomian nasional diprediksi kehilangan lebih dari separuh kapasitas normalnya, atau bahkan kehilangan sebagian besar kapasitasnya jika pemerintah tidak bergerak cepat.

Beberapa kebijakan dalam mengatasi perlambatan ekonomi terus diupayakan oleh pemerintah, dimulai dengan menerbitkan dua paket kebijakan fiskal terhadap ekonomi domestik, di samping program percepatan penanganan Covid-19 dan bantuan sosial. Beberapa insentif fiskal yang diberikan berupa penambahan anggaran kartu sembako, harga diskon tiket, percepatan program kartu prakerja dan program untuk menarik wisatawan mancanegara. Kemudian, pemerintah menyiapkan paket kebijakan fiskal jilid kedua, yakni insentif yang diberikan antara lain kebijakan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, lalu penundaan PPh pasal 22 dan pasal 25 kepada wajib pajak badan usaha termasuk UKM.

Terkait permasalahan ini DPR RI perlu mendorong pemerintah dengan menstimulasi konsumsi dan kebijakan dalam jangka panjang difokuskan untuk mendorong investasi. Selain itu mempercepat pemulihan pandemi Covid-19 dan memperbaiki sistem kesehatan diyakini mampu mempertahankan kepercayaan negara-negara investor di Indonesia.

### Referensi

Badan Pusat Statistik. 2020. Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen, 5 Mei 2020, [https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulanti-i-](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulanti-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html)

[2020-tumbuh-2-97-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulanti-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html), diakses 13 Mei 2020.

Bappenas 2020. *Perkembangan ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2019*. Jakarta, Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS.

Hariyadi, A.,R. 2020. "Mengantisipasi Perlambatan Ekonomi Indonesia", <https://indonews.id/artikel/28430/Mengantisipasi-Perlambatan-Ekonomi-Indonesia/>, diakses 11 Mei 2020.

"Ini Skenario 'Sangat Berat' Ekonomi RI 2020 dari Sri Mulyani", 7 Mei 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200507121420-4-156911/ini-skenario-sangat-berat-ekonomi-ri-2020-dari-sri-mulyani>, diakses 18 Mei 2020.

"Ini 3 Alasan IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global", 21 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200121134733-17-131569/ini-3-alasan-imf-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-global>, diakses 12 Mei 2020

"Lingkaran Setan: Daya Beli Lesu, Ekonomi Melambat, dan PHK", 10 Mei 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009318/lingkaran-setan-daya-beli-lesu-ekonomi-melambat-dan-phk>, diakses 18 Mei 2020.

"Perekonomian Indonesia Pasca-Pandemi Covid-19", 10 Mei 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 13 Mei 2020.

"Pertumbuhan Ekonomi di masa Pandemi. Waspada Kondisi Terburuk", 8 Mei 2020, <http://www.koransolo.co/2020/05/08/pertumbuhan-ekonomi-di-masa-pandemi-waspada-kondisi-terburuk/>, diakses 13 Mei 2020.

“Press Conference Langkah Penguatan Perlindungan Sosial Dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19”, 1 April 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>, diakses 13 Mei 2020.

“Sah, Perppu No. 1/ 2020 disepakati menjadi Undang-Undang”, 6 Mei 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/sah-perpu-nomor-1-2020-disepakati-menjadi-undang-undang>, diakses 12 Mei 2020.



Burhanudin Mukhamad Faturahman  
[burhanudin.faturahman@dpr.go.id](mailto:burhanudin.faturahman@dpr.go.id)



Mandala Harefa  
[manhar@dpr.go.id](mailto:manhar@dpr.go.id)

---

Mandala Harefa, S.E., M.Si., menyelesaikan Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang desentralisasi dan ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisa kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang, dan mempersiapkan makalah bagi Pimpinan, Alat Kelengkapan Dewan, dan para Anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku, yang topiknya berkaitan dengan permasalahan terkait kebijakan publik sesuai dengan fungsi kedewanan, antara lain mengenai keuangan negara dan daerah, ekonomi regional, dan topik lainnya.

Burhanudin Mukhamad Faturahman, adalah Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan kuliah Program Magister Universitas Brawijaya tahun 2017. Tertarik pada penelitian bidang administrasi publik dan administrasi pembangunan.

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*